

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

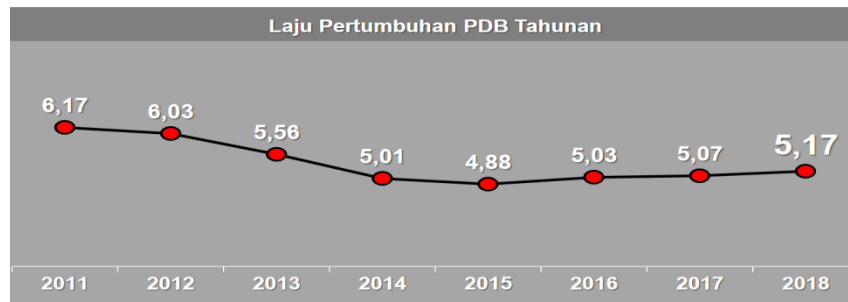
Krisis ekonomi tahun 1998 yang melanda bangsa Indonesia memberikan dampak berupa peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Disatu sisi krisis tersebut telah memberikan dampak yang cukup mempengaruhi perekonomian pada tingkat kemiskinan namun disisi lain dampak tersebut juga nilai tambah bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia yang akan datang, karena krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total diseluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia yang mewujudkan terciptanya masyarakat madani, terciptanya *good governance* dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan (Abdullah, 2012).

Indonesia merupakan Negara berkembang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik namun dilihat dari sisi kesejahteraan masih banyak yang harus dibenahi agar peran Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dapat terpenuhi (Marsudi dkk,2019). Pertumbuhan juga merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan keuangan daerah yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Astuti, 2015).

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa rill terhadap penggunaan faktor-faktor produksi tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan rill masyarakat pada tahun sebelumnya salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah periode tertentu

adalah tingkat pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto rill (Berliani, 2016)

Pertumbuhan Perekonomian Indonesia dapat dilihat dari gambar grafik ini :



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2011-2018

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018.

Gambar 1.1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2018 mencapai 5,17 persen, yang berarti lebih tinggi dibanding pertumbuhan 2017 sebesar 5,07 persen, bahkan tertinggi dalam 4 (empat) tahun terakhir, menunjukkan *trend* yang baik, karena dibandingkan beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2018 menunjukkan peningkatan. Catatan Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan 5,17 persen itu merupakan yang tertinggi sejak 2014. Pada 2014 pertumbuhan ekonomi tercatat 5,01 persen, 2015 sebesar 4,88 persen, 2016 sebesar 5,03 persen, dan 2017 sebesar 5,07 persen.

Pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,17 persen itu merupakan pencapaian yang baik di tengah ekonomi global sepanjang tahun tersebut. Sumber pertumbuhan ekonomi pada sepanjang 2018 adalah industri pengolahan (0,91 persen), disusul perdagangan (0,66 persen), konstruksi (0,61 persen), pertanian (0,49 persen), dan lainnya (2,50 persen). Adapun menurut pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 persen adalah konsumsi rumah tangga sebesar 2,74 persen,

pembentukan modal tetap bruto 2,17 persen, konsumsi pemerintah 0,38 persen, dan lainnya 0.87 persen.

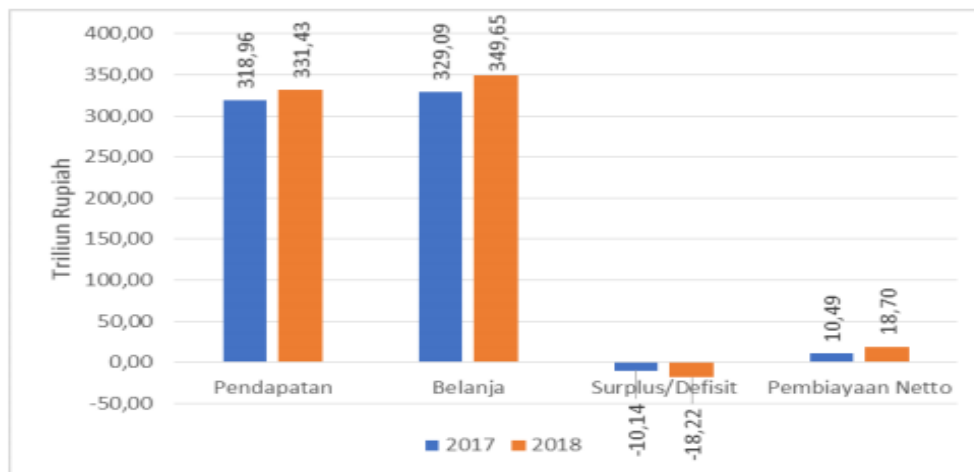
Keberhasilan otonomi daerah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan masing-masing daerah dalam mengembangkan kemajuan pemerintahan, sektor ekonomi dan lainnya. Era Otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001 memberikan wewenang pemerintah daerah yang semakin luas dalam mengatur pemerintahan termasuk dalam keuangan daerah (Yuliana, 2017). Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan-pembangunan yang ada didaerah.

Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan serta mengelola keuangan daerah secara mandiri (Sujarweni, 2015:231). Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah (Sari, 2016). Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan implikasinya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Arsa, 2015).

Diterapkannya kebijakan otonomi pada suatu daerah dapat menyebabkan keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah dapat

diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat oleh sebab itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan (Antari dan Bagus, 2018). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah memberikan ukuran penilaian yang lebih kompleks karena variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah beraneka ragam dengan menggunakan berbagai macam pengukuran sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dapat diukur hanya dengan menggunakan satu variabel (Mahsun dkk, 2012:165). Kemampuan mengelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya serta mampu membiayai pembangunan daerah dan pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat (Rondonuwu dkk, 2015).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah ruang lingkup keuangan daerah pada tingkat pemerintah daerah yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Halim dan Kasufi, 2016:31). Perimbangan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja tahun 2018 dapat dilihat dari gambar di bawah ini :



Gambar 1.2 Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintahan Provinsi 2017-2018

Sumber : DJP Keuangan 2018.

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan pada tingkat Pemerintah Provinsi Anggaran Pendapatan pada APBD 2018 mengalami peningkatan dengan total pendapatan sebesar 331,43 triliun di bandingkan pada tahun 2017 sebesar 318,96 triliun sementara pada peningkatan anggaran belanja pada tahun 2018 sebesar 349,65 triliun dibanding pada tahun 2017 sebesar 329,09 triliun.

Pengelolaan keuangan keuangan daerah yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk membuat peraturan dalam pembangunan daerah sehingga laporan pertanggung jawaban keuangan daerah wajib diberikan setiap tahunnya (Lucky, 2013). Alat untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal mengelola keuangan daerahnya adalah dengan menerpakan keuangan daerah rasio kemandirian, efisiensi, efektivitas, efisiensi dan aktivitas (Halim, 2012:230).

Rasio kemandirian merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak restribusi (Halim, 2012:232). Bila Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah tinggi maka presentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pelayanan pembangunan juga tinggi, begitu pula sebaliknya (Florida, 2016). Beberapa penelitian mengenai pengaruh rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi memberikan hasil Astuti (2015) dan Sari dkk (2015) yang membuktikan bahwa rasio kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan hasil penelitian Siregar (2016) yang menunjukkan hasil bahwa rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio kemandirian yang semakin tinggi mengisyaratkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi dengan pendapatan asli daerah yang tinggi akan memberikan perkembangan yang pesat karena daerah semakin maju dan berkembang perekonomiannya, sehingga akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Linawari dan Suhardi, 2017).

Rasio efektivitas merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. (Halim, 2012:234). Penelitian mengenai rasio efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi Astuti (2015), Sari dkk (2015) yang menunjukkan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding target

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pun sebaliknya Sari (2016).

Rasio efisiensi merupakan alat ukur untuk menilai biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menghasilkan pendapatan daerah (Marsudi dkk, 2019). Penelitian mengenai rasio efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi Kumpangpune dkk (2019), memberikan hasil bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2015), Nurlita dan Hamdani (2018), yang menyatakan bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain, rasio efisiensi tinggi maka pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami kenaikan.

Rasio aktivitas merupakan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pembangunan secara optimal Hillegonda dkk (2018). Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2012:234). Penelitian mengenai rasio aktivitas terhadap pertumbuhan ekonomi memberikan hasil penelitian Hillegonda dkk (2018), menyatakan bahwa rasio aktivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berarti peningkatan atau penurunan pertumbuhan dipengaruhi oleh rasio aktivitas. Berbeda dengan hasil penelitian Purwaningsih (2013). Rasio aktivitas menunjukkan bahwa prioritas pengalokasian dananya lebih ditekankan pada belanja operasional dari pada belanja

modal pemerintah daerah mampu mempertahankan pertumbuhannya dari periode ke periode berikutnya sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Rasio kemandirian, Rasio efektivitas, Rasio efisiensi dan Rasio aktivitas adalah sebagai kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 13 Tahun 2006 diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi aspek pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Aspek belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, selanjutnya aspek pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan (Nurhayati, 2015) .

Menurut Abdul Husain (2012) Dalam Pandangan Islam mengenai kinerja Keuangan Pemerintah daerah Allah SWT akan membalas setiap amalan yang dilakukan oleh masing-masing manusia. Sehingga, jika kalau dikaitkan dengan kinerja keuangan daerah adalah tersebut dapat melaksanakan dengan baik manajemen keuangannya, maka daerah tersebut akan mendapatkan hasil yang baik juga. (QS. Al-Ahqaf (46):19). Islam mempunyai karakteristik tersendiri agar tujuan pertumbuhan ekonominya bisa tercapai meliputi berimbang (*Tawazun*) pertumbuhan tidak hanya diprioritaskan untuk menciptakan pertambahan produksi, namun ditunjukkan berlandaskan asas keadilan distribusi sesuai dengan firman Allah : “ *Berbuat adillah kamu, sesungguhnya hal itu yang paling dekat dengan ketakwaan*”(QS.Al-Maidah (5):8. Pertumbuhan juga memerlukan adanya

keberimbangan usaha-usaha pertumbuhan. Oleh karena itu, islam tidak menerima langkah kebijakan pertumbuhan kota yang mengabaikan perdesaan, industri yang mengabaikan pertanian atau dengan mengsentrasikan percepatan pembangunan program tertentu dengan mengabaikan program tertentu dengan mengabaikan sarana umum dan prasarana pokok lainnya.

Hasil penelitian dari penelitian terdahulu menghasilkan hasil yang berbeda, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini diberi judul “**Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Aktivitas Terhadap Peertumbuhan Ekonomi Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam (studi Pada Pemerintahan Provinsi di Indonesia tahun 2016-2018)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah rasio kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ?
2. Apakah rasio efektivitas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ?
3. Apakah rasio efisiensi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ?
4. Apakah rasio akktivitas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ?
5. Bagaimana rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan pertumbuhan ekonomi ditinjau dari sudut pandang islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk mengetahui pengaruh rasio efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Untuk mengetahui pengaruh rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Untuk mengetahui pengaruh rasio aktivitas terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. Untuk mengetahui rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Pusat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintahan daerah Provinsi di Indonesia dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi para pembuat kebijakan, agar selanjutnya kebijakan yang dibuat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada Provinsi di Indonesia.
2. Bagi Pemerintah Daerah, Penelitian ini dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi Provinsi di Indonesia kearah yang lebih baik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, terlebih sebagai bahan pengambil keputusan untuk melakukan pemekaran daerah sebagai jawaban untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi.

3. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bahan referensi, menambah informasi, dan sumber ilmu pengetahuan, terutama akuntansi pemerintahan dan sektor publik serta pertumbuhan ekonomi.
4. Bagi Peneliti lainnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang ilmu ekonomi dan akuntansi dan dapat menjadikan perbandingan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi tentang keadaan Pertumbuhan ekonomi Provinsi di Indonesia agar selanjutnya dapat saling membantu antara masyarakat dan pemerintah agar memajukan daerah otonomnya sendiri.